

ISTIMEWA

MENINJAU - Bupati Suwirta saat meninjau taman di utara situs Goa Jepang belum lama ini. Lahan taman ini disebut-sebut sebagai lahan milik Pura Mas Ayu.

Anggarkan Rp 3,2 Miliar

GOA Jepang merupakan situs yang dibuat oleh tentara Jepang pada tahun 1941-1942. Tujuannya sebagai tempat perlindungan dalam upayanya mempertahankan diri dari serangan tentara sekutu di masa Perang Dunia Kedua. Goa ini memiliki 16 lubang dengan kedalamannya mencapai 14 meter yang saling dihubungkan oleh sebuah lorong memanjang arah utara hingga selatan.

Penataan situs ini sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2014 silam. Namun karena keterbatasan anggaran, rencana penataan baru dapat dilakukan tahun ini. Pemkab telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,2 miliar lebih pada APBD tahun 2017.

Wayan Muliarsa selaku Perwakilan BPCB Balwi menyarankan, saat melakukan penataan terhadap situs Goa Jepang agar turut melibatkan Badan Geologi. Hal ini untuk mengetahui struktur dan kekuatan Goa Jepang yang sudah berusia puluhan tahun itu. Wayan Muliarsa juga berjanji Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali akan membantu Pemda Klungkung dalam pengembangan dan pemanfaatan cagar Budaya Goa Jepang. (mit)

Edisi : Rabu, 8 Feb 2017

Hal : 4



Kelian Berharap Dapat Ganti Rugi

Lahan Taman Goa Jepang Klungkung Diklaim Subak
Bupati Buka Data Pastikan Status Kepemilikan

SEMARAPURA, TRIBUN BALI - Lahan yang digunakan taman di sebelah utara situs Goa Jepang ternyata masih menyimpan sekelumit masalah. Kabarinya, lahan tersebut adalah milik Pura Mas Ayu atau Pura Ulun Suwi yang diusung oleh *krama subak* Delod Banjarangkan. Kelihan Subak Delod Banjarangkan, I Wayan Dana mempertanyakan nasib tanah pura tersebut.

"Lahan yang dimanfaatkan sebagai taman itu sebenarnya adalah tanah Pura Mas Ayu yang diusung oleh *krama subak* Delod Banjarangkan. Saya dengar informasinya Goa Jepang akan ditata sehingga saya bisa bertemu dengan bapak bupati untuk menyampaikan hal ini," ujar Dana belum lama ini.

Momen kunjungan Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta ke situs Goa Jepang ke Banjarangkan, Senin (5/2) ia gunakan untuk menyampaikan keluhannya tersebut. Sesaat setelah Suwirta dan tiba di situs Goa Jepang, pria paruh baya tersebut langsung menghampiri. Ia menyampaikan lahan yang saat ini dimanfaatkan sebagai taman merupakan lahan Pura Mas Ayu.

Sebagai buktinya, ia menunjukkan selebar SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan) untuk meyakinkan lahan seluas sekitar dua are itu memang benar milik Pura Mas Ayu.

"Kami tetap mendukung upaya pemerintah untuk menata kembali situs

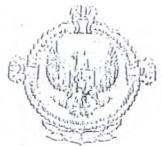
Goa Jepang, selama masyarakat tidak dirugikan. Kalau lahan pura tetap dimanfaatkan, kami selaku *pengempon* berharap agar lahan tersebut bisa diganti rugi," kata Dana.

Bupati akan membuka data blok terlebih dahulu untuk mengetahui apakah lahan tersebut memang milik Pura Mas Ayu. Bila benar, pihaknya akan melakukan pembicaraan lebih lanjut.

"Ini kan terkait taman dan pergeseran jalan yang rencananya akan kita lakukan. Jadi terkait lahan itu, kita akan buka dulu data blok, apakah memang milik pura. Sebagai bupati saya punya niat baik untuk kembangkan objek ini, apalagi Goa Jepang ini adalah cagar budaya," kata Suwirta.

Ia menyebutkan, penataan dari Goa Jepang sudah mantap direncanakan sejak akhir 2016 lalu. Namun ketika dicek perencanaannya, ternyata yang ditata hanya disisi selatan goa yang hanya sebagai pelengkap. Suwirta pun harus kembali menugaskan Dinas PU untuk merancang ulang seluruh penataan situs Goa Jepang

"Anggaran sudah disiapkan, dan tahun ini kita sudah siap lakukan penataan. Tapi Setelah saya buka perencanaannya, ternyata bukan situs goa jepang yang ditata, Tapi bagaimana sebagian besar yang ditata adalah pelengkap di sisi selatan goa, seperti bagaimana buat *restaurant, bale bengong* dan tempat pentasnya. Makanya saya cek langsung ke lapangan dan melibatkan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)," kata Suwirta. (mit)



MENUNGGU DANA DESA

TERLAMBAT

- Seharusnya tahap pertama cair **Februari 2017**
- Tahap pertama besaran **60 persen**
- Diperkirakan Maret baru cair

PENYEBAB

- Ada aplikasi baru untuk menyusun anggaran desa
- Dulu menyusun dengan cara manual
- Kini harus memakai sistem siskeudes (sistem keuangan desa)
- Sudah ada poin-poin seperti perencanaan anggaran, penatausahaan, evaluasi dan pelaporan

DANA DESA DI BALI

- Bali mendapat **Rp 537,2 miliar**
- Untuk **636 desa**

KABUPATEN/KOTA

Tabanan	Rp 106.417.874.000
Buleleng	Rp 105.860.971.000
Jembrana	Rp 36.475.565.000
Badung	Rp 40.315.619.000
Gianyar	Rp 55.753.828.000
Bangli	Rp 55.783.753.000
Klungkung	Rp 44.540.097.000
Karangasem	Rp 63.682.742.000
Denpasar	Rp 28.428.056.000

**Rata-rata per/desa
Rp 844.746.000.**

Maret Ditarget Cair

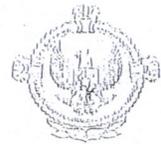
KEPALA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bali, I Ketut Lihadnyana mengatakan, dana desa tetap dicairkan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama 60 persen dan tahap kedua 40 persen.

Untuk dana desa tahap pertama yang dialokasikan tahun 2017 diharapkan cair pada bulan Maret 2017. "Terkait dengan masalah pencairan ini mudah-mudahan Maret ini sudah bisa cair semua, karena ini kan APBD-nya sedang disusun karena sekarang pakai Siskeudes," jelasnya.

Pun demikian, sejumlah daerah masih dalam proses penyusunan, hanya saja ada daerah yang juga belum selesai dalam menyusun anggaran desa memakai siskeudes. "Di Karangasem belum selesai Siskeudes-nya," jelasnya. (agw)

Edisi : Rabu, 8 Feb 2017

Hal : 8



Rp 10 M untuk Alkes dan Operasional RS Nyitdah

TABANAN, TRIBUN BALI – Rumah Sakit Nyitdah pada 2017 akan mendapatkan gelontoran dana dari Pemkab Tabanan sebesar Rp 10 miliar untuk melengkapi alat kesehatan (Alkes) dan operasional. Dana yang digelontorkan untuk melengkapi layanan rumah sakit di Kecamatan Kediri itu bersumber dari anggaran induk 2017.

Direktur RS Nyitdah, dr Nyoman Wisma Brata mengatakan, dana miliaran rupiah tersebut tak hanya diarahkan untuk melengkapi alat-alat medis, melainkan juga untuk pemeliharaan gedung, ambulans dan kendaraan operasional. Sementara sisanya akan ditambah pada anggaran perubahan.

"Sisanya sudah dikordinasikan dengan Bappeda. Kami juga masih memerlukan fasil-

itas alat-alat laboratorium, *rontgen, bed* dan mesin anastesi agar kamar operasi yang tersedia bisa segera beroperasi," katanya saat mendampingi kunjungan Komisi IV DPRD Tabanan ke rumah sakit yang luasnya sekitar tujuh hektare tersebut, Selasa (7/2).

Ia mengatakan, masyarakat di Tabanan memang memerlukan layanan kesehatan yang memadai. Untuk itu, pihaknya akan segera melengkapi sarana dan prasarana seperti alat medis di tahun anggaran induk 2017 ini agar pelayanan di RS Nyitdah bisa berjalan.

"Fasilitas laboratorium masih belum kita miliki, dan sudah ada informasi dari bagian keuangan Dinas Kesehatan, di triwulan satu ini sudah bisa start belanja," ungkapnya.

RS Nyitdah menjadi rumah

sakit mandiri, memiliki manajemen dan izin terpisah dari BR-SUD Tabanan mulai 1 Januari 2017. Namun dalam pelayanan belum bisa berjalan optimal karena minimnya alat-alat medis dan tenaga kesehatan.

Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Made Dirga berharap agar layanan RS Nyitdah bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Ia pun mendesak rumah sakit maupun pihak terkait lainnya agar rumah sakit dengan bangunan yang megah ini bisa difungsikan secara maksimal.

"Kami ketahui saat ini BR-SUD Tabanan sangat kewalahan dengan membludaknya pasien, bahkan sampai kekurangan *bed*. Saya harap gedung ini bisa segera bermanfaat dengan cepat," ucapnya. (arg)

Edisi : Rabu, 28 Feb 2017

Hal :